

DIMENSI PRAGMATISME POLITIK DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI

Ahmad Burhan Hakim¹, Satriyo Pringgo Sejati²

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia,

² Universitas Papua, Indonesia

burhanhakim@insud.ac.id¹⁾, s.sejati@unipa.ac.id²⁾

Abstract:

Democracy is a political system and ideologue that has been widely applied in various countries in the post-cold war world. Democracy tries to become an international political regime that is so gallant and ideal in terms of the system and the dimensions of its use. Democracy does not only discuss matters of state and government, but also issues of basic human values in the form of human rights, humanity, egalitarianism, gender, femininity and even capitalist economic issues which are also closely related to democracy. But another fact occurred, the ideal dimension of democracy shifted to pragmatism and transactional politics with the emergence of the reality of the rampant practice of money politics in Indonesia. The emergence of these things is certainly not in a vacuum and without effort. The issue of money politics has become a big and terrible scourge amid the consolidation and development of democracy in Indonesia today. Political pragmatism occurs not only at the central level in the form of presidential elections but has reached the grass roots, namely elections to villages. So that this is suspected by many parties as part of the emergence of a culture of corruption in Indonesia. In other words, the rampant cases of corruption that occur in Indonesia are more likely to occur because of the extraordinarily large cost politics in the implementation of democracy. Both in terms of subject and political object in Indonesia. So this will become a political pathology that must be addressed immediately. The political pragmatism that occurs in Indonesia has an extraordinary transactional political economy dimension. So this should be a red note for democracy in Indonesia. So the ideals of reform that have been echoed since 1998 can be realized gradually. However, if the problem of money politics is still rife, then the ideals of reform in the form of realizing Indonesia as a democratic country will experience extraordinary distortions.

Keywords: *democracy, pragmatism, money politics*

Abstrak:

Demokrasi merupakan salah satu sistem dan ideologue politik yang banyak diaplikasi di berbagai Negara di dunia pasca perang dingin. Demokrasi mencoba menjadi rezim politik internasional yang begitu gagah dan ideal secara sistem dan dimensi penggunaannya. Demokrasi tidak hanya membahas soal Negara dan pemerintahan, namun juga persoalan nilai dasar kemanusiaan berupa HAM (Hak Asasi Manusia), Humanity, egaliter, gender, feminisme bahkan sampai persoalan ekonomi kapitalis yang juga erat hubungannya dengan demokrasi. Namun fakta lain terjadi, dimensi ideal demokrasi bergeser menjadi pragmatisme dan politik transaksional dengan munculnya realitas berupa maraknya praktik money politics di Indonesia. Munculnya hal tersebut tentu tidak pada ruang hampa dan tanpa upaya. Persoalan money politics menjadi momok besar dan mengerikan ditengah konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Pragmatisme politik terjadi tidak hanya pada tingkat pusat berupa pemilu presiden namun sudah sampai akar rumput yakni pemilihan kepada desa. Sehingga hal ini ditengarai oleh banyak pihak sebagai bagian dari munculnya budaya korupsi di Indonesia. Dengan kata lain maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia lebih banyak terjadi karena cost politics yang luar biasa besar dalam pelaksanaan demokrasi. Baik secara subjek dan objek politik di Indonesia. Sehingga hal ini akan menjadi patologi politik yang harus segera di atasi. Pragmatisme politik yang terjadi di Indonesia mempunyai dimensi ekonomi politik transaksional yang luar biasa. Maka hal tersebut sudah seharusnya menjadi catatan merah bagi demokrasi di Indonesia. Maka cita-cita reformasi yang sudah digaungkan sejak tahun 1998 bisa terwujud secara gradual. Namun apabila persoalan *money politics* masih marak terjadi maka cita-cita reformasi berupa terwujudnya Indonesia sebagai Negara demokrasi akan mengalami distorsi yang luar biasa.

Kata Kunci: *demokrasi, pragmatisme, money politics*

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi pilihan logis banyak Negara di dunia sebagai konsep dan sistem politik yang masih dianggap paling ideal saat. Demokrasi menjadi suatu sistem dan rezim politik internasional yang memberi warna dan dinamika tersendiri dalam dinamika politik dan ekonomi suatu Negara termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya demokrasi menjadi bagian dan identitas penting sebagai bagian dari wajah politik dalam negeri suatu negara. Setelah berakhirnya perang dingin pada awal 1990, demokrasi menjadi sistem, ideology dan konsep politik yang banyak di pakai oleh Negara secara internasional. Sehingga demokrasi menjadi proyek mercusuar yang berhasil pada penerapan sistemnya di banyak Negara. Indonesia menjadi salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia yang mampu menerapkan hal tersebut (sebut demokrasi). Pemilihan presiden langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004 menjadi titik baru dan langkah baru Indonesia dalam menata konsep dan sistem politik nasional. Walaupun sebelumnya sudah terjadi reformasi pada tahun 1998 dan berbagai gejolak politik pada decade sebelumnya. Namun geliat politik demokrasi nasional berkembang pesat pasca lahirnya reformasi.¹

Secara nyata konsep demokrasi menjadi suatu yang indah dan menarik untuk dilakukan suatu kajian. Protocol sistem politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi magnet utama bangsa-bangsa di dunia untuk menerapkan demokrasi di Negara nya. Indonesia sendiri memang secara praktis menerapkan demokrasi dengan sistem pemilu yang berjalan secara langsung. Baik dalam pemilihan presiden, legislatif (disemua tingkatan), kepala daerah sampai bahkan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara serius menggarap konsep demokrasi untuk dijadikan aktor ideology dan sistem politik utama selain konsep dan pengembangan pancasila.²

Indonesia sepertinya secara sadar menganggap bahwa demokrasi adalah salah satu sistem dan ideology yang ideal untuk dilaksanakan, sehingga perhelatan pemilihan umum dinamakan sebagai pesta demokrasi rakyat. Walaupun hal tersebut tentu menguras banyak APBN untuk melaksanakan hal tersebut. Dalam perjalannya demokraso sendiri secara konsep adalah konstan, hanya saja dalam praktiknya mengalami banyak perubahan, pengembangan

¹ Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi biaya tinggi: dimensi ekonomi dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia pasca orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), 257-279.

² Sahroni, A., Prianto, G. F., Ernungtyas, N. F., & Afriani, A. L. (2020). "POLITIK TANPA MAHAR": SEMIOTIKA JARGON KOMUNIKASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI ERA DEMOKRASI BIAYA TINGGI. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 13(2).

bahkan mengalami kemunduran. Hal ini terjadi lantaran ada suatu bentuk- bentuk praktik transaksional yang tidak bisa dihindari dalam demokrasi.

Contoh yang paling sederhana yakni politik uang atau *money politic*, transaksi kegiatan ini marak terjadi dalam semua lapisan event-event demokrasi yang ada di Indonesia bahkan sampai merebak sampai di PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Hal tersebut tentu tidak muncul dari ruang hampa dna tanpa sengaja. Aktor-aktor politik dalam kegiatan demokrasi seolah menganggap bahwa demokrasio tidak bisa jalan tanpa uang taktis. Tentu kondisi semacam ini sudah marak yang menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Dalam realitas politik hal ini menjadi benar adanya, hanya saja ketika hal tersebut tidak bisa dibendung dan berkembang secara liar maka nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi akan mengalami kemunduran bahkan distorsi. Hal inilah yang penulis sebagai bagian dari dimensi pragmatisme politik dalam demokrasi kita hari ini.³

Menjadi suatu masalah lain apabila persoalan ini tidak menemui solusi cerdasnya. Mengingat cost politik dalam melaksanakan demokrasi sangat tinggi, belum lagi uang yang harus dikeluarkan oleh banyak kandidat yang bertarung di dalamnya. Namun hal aneh juga terjadi, para politik seperitnya juga tidak mau menjadi kambing hitam atas kejadian tersebut. Politik menyebut bahwa tidak hanya politisi yang pragmatis tapi masyarakat juga tidak kalah demikian. Hal ini seperti gayung bersambut antara rakyat dan wakilnya. *Money politic* seolah menjadi wajar dan dibutuhkan dalam konsep-konsep strategis kemenangan dalam demokrasi. Sehingga rakyatpun menjadi objek pragmatisme politik tersebut.⁴

Gelombang pragmatisme tersebut seolah tidak bisa dihindari bahkan sampai menjadi syarat yang mesti terpenuhi apabila ingin menjadi aktor dalam politik demokrasi di Indonesia. Manakala pemilu terjadi maka gelontoran dan putaran uang bisa mencapai triliunan rupiah, hal secara sederhana bisa dilihat dalam proses pemilu langsung yang terjadi di Indonesia. Penulis tidak membahas APBN yang telah dianggarkan namun lebih pada cost politik para peserta pemilu yang luar biasa besar. Contoh kecil sekali pencalonan Kepala Daerah baik Bupati dan Wali Kota tiap-tiap paling tidak harus menyiapkan dana lebih kurang 50 milyar rupiah. Ini baru pilkada tingkat II belum pada pilkada tingkat I dan pemilihan presiden. Kondisi semacam ini ditengarai menjadi penyebab utama munculnya banyak

³ Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.

⁴ Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 12-22.

korupsi di Indonesia. Pola semacam ini memberikan dampak radikal pada tatanan politik pragmatis secara nasional dan daerah di Indonesia.

Kita memang tidak bisa menghindari dari kapilatisasi dan polarisasi dana taktik pemilu yang secara menjadi salah satu modal utama selain modal sosial. Dengan demikian maka bisa dilihat secara kasat mata bahwa bahan bakar utama mesin politik di Indonesia adalah uang (kapital) yang secara nyata hal tersebut sangat disadari oleh para politisi bahkan rakyat Indonesia sendiri. Apabila hal tersebut tidak bisa dihindari dan bahkan mengalami perkembangan yang luar biasa maka, secara tentu demokrasi menjadi korban dari kegiatan pragmatis tersebut. Nilai-nilai ideal dalam demokrasi tentu mengalami dekandensi bahkan distorsi seperti yang penulis jelaskan di awal. Kemudian yang paling dirugikan dalam praktik tersebut yakni rakyat Indonesia sendiri sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam konsep ideal demokrasi.

Gelaja patologi politik berupa *money politic* harus secara cermat menjadi evaluasi bagia banyak pihak, sehingga cita-cita reformasi Indonesia bisa terwujud. Namun ternyata hal tersebut menjadi wajar adanya ketika Amerika Serikat sendiri butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk melaksanakan demokrasi mereka, sedangkan indonesi masih hamper 20 tahun terkahir. Praktik seperti ini harus ditemukan solusi cerdas sehingga rakyat tidak menjadi korban utama dari praktik tersebut. Maka secara sederhana harus ada model pendidikan politik cerdas yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia. Hal ini bisa dilakukan agar masyarakat Indonesia menjadi melek dan mawas diri atas praktek pragmatis demokrasi yang begitu jahat dan luar biasa. ⁵

METODE

Metode penelitian kualitatif deksriptif dan eksplantif menjadi pilihan untuk digunakan karena mempermudah dalam teknik operasional konsep dan teori. Teknik analisis data menggunakan pendekatan wacana ilmiah dengan bantuan *library research* dengan menggunakan data primer dari buku, internet dan beberapa karya ilmiah yang dianggap obyektif dalam melakukan penelitian. Sehingga kendala operasional penelitian mudah untuk diatasi. Selain itu penelitian ini berbasis pada peneltian rumpun ilmu sosial dan politik. Sehingga penggunaan konsep-konsep politik banyak diemukan dalam tulisan ini. Haln ini

⁵ Ibid Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 12-22.

sesuai dengan concern studi yang kami ambil, sehingga dapat dilakukan ekplanasi yang lebih komprehensif. Dengan kata lain pendekatan metode penelitian ilmu sosial dan politik menjadi lumrah dalam artikel ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Praktik demokrasi di Indonesia sudah ada sejak masa orde lama atau pasca kemerdekaan namun proses fast track pelaksanaannya lebih berkembang pasca reformasi. Sehingga masyarakat hari ini lebih dekat dengan demokrasi. Rakyat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi politik yang ada di Indonesia. Secara konsep rakyat mempunyai kuasa penuh dalam demokrasi. Namun secara fakta dan realitas rakyat Indonesia hanya menjadi objek politik pragmatis yang terbangun dari budaya demokrasi yang terjadi di Indonesia, sehingga nilai-nilai dalam demokrasi menjadi suatu hal yang sepertinya mahal adanya di republic ini. Belum lagi soal kambing hitam bahwa rakyat Indonesia pun cukup pragmatis juga dalam melaksanakan demokrasi. Hal ini seperti tidak berujung dan saling menyalahkan satu sama lain.

Tentu hal ini sangat disayangkan apabila terjadi secara terus menerus. Praktik *money politic* yang terjadi di Indonesia sudah sampai pada tahap kritis. Hampir tidak ditemukan bahwa peserta politik demokrasi di Indonesia berlatar belakang orang miskin dan tidak beruang. Peserta politik yang ada adalah mereka yang punya kekuatan kapital yang luar biasa besar. Hal ini menunjukkan bahwa bahan bakar utama dalam mesin politik di Indonesia yakni uang. Sehingga *money politic* sulit dihindarkan dalam dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Hampir tidak ada control atas kejadian tersebut semua seolah diam dan tak mampu membendung arus politik yang kuat tersebut. Hal inilah yang menjadi pusaran kelap maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sehingga perlu adanya treatment tertentu untuk mengurangi gejala tersebut.⁶

a. Demokrasi dan Kepentingan Rakyat

Uang dan kekuasaan saling terkait dalam kehidupan politik suatu negara. Persimpangan antara uang dan politik telah menjadi sesuatu yang kontroversi di setiap negara yang demokratis dan uang merupakan hal

⁶ Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93-105.

yang paling esensial dalam pelaksanaan demokrasi apapun.⁷ Pengaturan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Pemerintah dalam rangka memperkuat peran partai politik sebagai sarana untuk pendidikan politik sejatinya memberikan dampak positif, guna meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat terlibat dalam partai politik tersebut.⁸

Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Penguasa dan rakyat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat berdirinya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan negara lain.⁹ Penguasa yang dimaksud adalah pemerintah, yakni rakyat yang memiliki kewenangan pemerintahan untuk mewakili rakyat yang lain dengan dilekati kewenangan pemerintahan untuk mengatur negara. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintah dipilih oleh mayoritas rakyat, kemudian disahkan menjadi penyelenggara negara sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.

Negara hukum demokratis, memiliki dua kedaulatan yang bersintetis dan diintegrasikan menjadi satu. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan hukum artinya kedaulatan didasarkan pada hukum (nomokrasi), dimana perundangan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Konsep nomokrasi dikemukakan pertama kali oleh Plato dalam bukunya *Nomoi*, dalam buku itu Plato memberikan petunjuk bahwa suatu peraturan yang disepakati bersama sebaiknya dimuat dalam suatu buku perundangan.¹⁰ Sedangkan kekuasaan rakyat artinya adalah kedaulatan ada pada rakyat (demokrasi), dimana rakyat memegang kendali penuh atas negaranya. Sesuai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.¹¹ Bisa ditarik kesimpulan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan atau dalam suatu negara, di mana masing-

⁷ Anthony, Butler, 2010, *Paying for Politics* (Party funding and political change in South Africa and the Global South, Ultra Litho, Johannesburg, hlm. 1

⁸ Antoro, B. H. W. (2016). MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT). *Justitia et Pax*, 32(2).

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm. 42-44.

¹⁰ Lihat Plato, *The Laws of Plato*, Manchester: University of Manchester Press, (1921), hlm. 49.

¹¹ Harry C. Boyte, *The Citizen Solution: How You Can Make a Difference*, St. Paul: Minnesota Historical Society, (2008), hlm. 15.

masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan publik.

Sebuah negara secara umum menganut tradisi hukum *civil law* dan *common law*. *Civil law* merupakan tradisi hukum *rechstaat* (Jerman) yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl dimana kepastian hukum menjadi tolak ukur penyelesaian permasalahan.¹² Sedangkan *common law* merupakan tradisi hukum *the rule of law* (Inggris) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menjadikan yurisprudensi sebagai tolak ukur penyelesaian permasalahan.¹³ Berdasarkan pengantar yang telah dikemukakan, maka substansi permasalahan yang akan dibahas yakni bagaimana hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis.

b. Pragmatisme Politik dan Demokrasi

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, *pragma* berarti perbuatan atau tindakan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *pragmatic* yang berkenaan dengan hasil praktik.¹⁴ Sedangkan *Encyclopedia of Knowledge* menyatakan, pragmatisme adalah “*a philosophical movement, that holds that both the meaning and the truth of any idea are functions of its practical outcome.*”¹⁵ Terjemahan bebasnya yaitu, sebuah gerakan *fi losofi s*, yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya.

Jika dikaitkan dengan etika, maka pragmatisme akan memberi pengertian baru. Antara pragmatisme dan etika akan menghasilkan utilitarianisme yang memandang baik dan buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya.¹⁶ Secara substansi, berarti memang ada persamaan antara pragmatisme dengan utilitarianisme. Yaitu sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat, dan kebahagiaan. Maka tidak heran jika pragmatisme memandang hal yang baik, bermoral adalah sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih memuaskan. Adapun etika terfokus pada tujuan dan tidak hanya terfokus pada masalah benar atau salah, ini sebagaimana pendapat Pierce. Masalah mendasar etika adalah pada apa yang telah disiapkan seseorang dengan hati-hati sebagai ungkapan apa yang ingin dilakukan dan apa tujuannya.¹⁷

¹² Lihat Aristoteles, Politik, Yogyakarta: Benteng Budaya, (2004), hlm, 161. Diterjemahkan dari buku Politics, New York: Oxford University Press, (1995).

¹³ A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Edisi ke-3, London: Macmillan and co., (1889), hlm. 175- 176.

¹⁴ Zapurkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.

¹⁵ Toive Aartolahti, dkk, Grolier: Encyclopedia of Knowledge, Vol. XV, (United States: Academic American Encyclopedia, 1997), 173.

¹⁶ Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122

¹⁷ Arthur W. Burk, The Collected Papers of Charles Sanders Pierce, Vol. III, (Cambridge,

Pada perkembangannya, pragmatisme kemudian masuk dalam tipologi untuk menilai suatu kebenaran. Sehingga dalam filsafat, pragmatisme dikategorikan sebagai teori kebenaran. Ukurannya yaitu ketika kebenaran bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.¹⁸ Dalam konsepnya, pragmatisme menyatakan ukuran kebenaran diuji melalui dapat tidaknya dilaksanakan dan direalisasikan untuk membawa dampak positif, kemajuan, dan manfaat.¹⁹ Lebih jelasnya dapat disebut pragmatisme lalu memandang kebenaran, arti, atau nilai, suatu gagasan harus berdasarkan dari segi praktisnya.²⁰

Jika dilihat sekilas, sikap pragmatis di Indonesia lebih tertuju pada kepentingan kekuasaan. Untuk mencapai itu ideologi partai dilupakan, lantas pelaku politik pragmatis ini berpikir bagaimana cara merebut kekuasaan.²¹ Meminjam istilah Kuskridho, aktivitas semacam ini disebut dengan politik kartel.²² Yaitu politik tidak lagi mengurus kepentingan publik, melainkan berprofesi untuk mengurus kepentingan dalam dirinya sendiri. Seumpama dengan itu, kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit untuk dipisahkan antara pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya.²³ Citra ini kemudian menunjukkan dunia politik di Indonesia, berada pada masa hilangnya nilai etika, baik yang berasal dari ideologi (Pancasila), ataupun norma-norma politik lainnya. Maka tidak heran kalau sikap pragmatis seperti ini lebih dekat dengan perilaku hedonis.

Peristiwa di atas, dapat pula dilihat dari betapa buruknya jalan yang ditempuh oleh caleg. Misalnya membeli suara atau menyogok para anggota dewan agar mau memberi dukungan kepadanya.²⁴ Ada juga yang menghidupi partai dengan memanfaatkan elit-elit partai yang duduk di pelbagai lembaga negara, termasuk kementerian dan BUMN.²⁵ Salah satu akibatnya, terjadilah kericuhan yang sangat memalukan seperti saat proses pemilihan ketua DPR-RI, 2014 lalu. Semua ini,

Harvard University Press, 1958), 116.

¹⁸ Fauziah Nurdin, "Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap Islam," dalam *Jurnal Islam Futura*, Vol. XIII, No. II, (T.K: T.P, 2014), 185.

¹⁹ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam...*, 89.

²⁰ Zaprul Khan, *Filsafat...*, 116

²¹ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2017), 181.

²² Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), 22.

²³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Cet. III, 2012), 22.

²⁴ Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2017), 105.

²⁵ *Ibid.*, 132.

merupakan peristiwa politik yang menggambarkan kesan negatif bagi publik. Berangkat dari kondisi di atas, maka tulisan ini hendak menjelaskan sekaligus mengungkapkan, sampai sejauh mana pragmatisme menjalar, menyusup ke dalam politik di Indonesia.

c. *Money Politics* dan Budaya Demokrasi Kita

Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, karena keberagaman inilah maka diperlukan suatu sistem politik yang dapat menyatukan keberagaman ini. Pada saat ini, sistem politik demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Pancasila. Demokrasi mengizinkan warga Negeranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan praktek adanya kebebasan politik yang bebas dan setara.²⁶

Sejalan dengan diselenggarakannya pemilu, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa diadakanya sebuah pemilu. Kampanye digunakan sebagai upaya memperkenalkan profile para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa di pungkiri bahwa melalui kegiatan kampanye tersebut, aktor politik bisa dengan leluasa dalam mencari seluruh segmen pemilih untuk mendapatkan dukungan nantinya. kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.²⁷

Contoh pelanggaran kampanye adalah *money politic*. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislati tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika

²⁶ Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.

²⁷ Roger, S. (2010). Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009. salatiga: Pustaka Pelajar.hlm. 20-21

pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional.²⁸

Pada umumnya calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi DPD dan maupun DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir serupa yaitu dengan sistem money politic atau yang sering disebut dengan politik uang. Misalnya saja di daerah kabupaten/kota money politic terlihat sangat kontras, para kandidat langsung membeli suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga ratusan ribu rupiah untuk perorangnya. Dalam situasi di atas, rakyat sebagai konstituen bisa memiliki harga tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk menapatkan dan memiliki suara rakyat.²⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah sistem pemilu yang mana terbagi atas sistem distrik yaitu sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis dan sistem proporsional yaitu sistem yang dalam pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jenis faktor yang kedua adalah struktur kelembagaan pemilu dimana terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Dan faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu, terjadinya politik uang tidak lepas dari faktor masyarakat sebagai pihak penerima uang dan masyarakat (peserta pemilu) sebagai pihak pemberi uang, hal itu dikarenakan kebiasaan politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana dalam pemilu, dan belum memahami hakekat atau tujuan atas diselenggarakannya pemilu.³⁰

KESIMPULAN

²⁸ Op. cit Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.

²⁹ Ibid Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.

³⁰ Ibid. Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.

Tentu banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pragmatisme politik dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia. Salah satu faktor yang lebih dominan yakni penerapan demokrasi yang secara prosedur memang membutuhkan dana yang besar. Selain itu mental para politisi di Indonesia adalah jual beli sehingga banyak praktik dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia berbau unsur *money politics*. Hal ini tentunya menjadi fakta yang luar biasa terjadi di negeri ini, selain berdampak pada narasi kepemimpinan dan transaksional politik. Kegiatan tersebut punya bahaya laten berupa semakin pragmatise kegiatan politik maka unsur Negara dan cita-cita Negara menjadi nomor sekian. Ini menjadi fatal adanya ketika demokrasi mempunyai cita-cita luhur yakni terbentuknya Negara kesejahteraan. Hal menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih jauh pada tahap ideal. Namun untuk persoalan prosedur demokrasi maka ini masih menjadi ukuran yang positif. Dimana event-event demokrasi di Indonesia berjalan lancar dan terkendali (Pilpres, Pileg, pilkada dan pilkades). Walaupun tentu dengan banyak catatan-catatan merah sebagai bahan evaluasi.

Money politics seolah menjadi pasangan erat dan mesra apabila dihubungkan dengan proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia. Kunci dari *money politics* sebenarnya bisa juga dianalisis menggunakan konsep sederhana ekonomi yakni suplay dan demand. Dimana ada suatu permintaan tentu akan ada pasar yang terbentuk. Begitu pula dengan *money politics* dimana akan dan tercipta pangsa pasar untuk terjadinya transaksi ekonomi politik tersebut. Sehingga akan sulit untuk menghindari yang nama *money politics*. Hanya saja tetap hal tersebut dapat merusak demokrasi baik secara konsep maupun struktur politik di Indonesia, sehingga pada jangka panjang maka nilai-nilai demokrasia akan dipenuhi dengan unsur-unsur kapital yang berujung pada transaksi politik dan sedemikian pragmatis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunhardjana, Isme-Isme dalam..., 89¹Muhadam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2017), 181.
- A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Edisi ke-3, London: Macmillan and co., (1889), hlm. 175- 176.
- Anthony, Butler, 2010, Paying for Politics (Party funding and political change in South Africa and the Global South, Ultra Litho, Johannesburg, hlm. 1
- Antoro, B. H. W. (2016). Membangun demokrasi di atas kepentingan rakyat (ilusi kepentingan rakyat). *Justitia et Pax*, 32(2).
- Arthur W. Burk, The Collected Papers of Charles Sanders Pierce, Vol. III, (Cambridge,

- Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi biaya tinggi: dimensi ekonomi dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia pasca orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), 257-279.
- Fauziah Nurdin, "Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap Islam," dalam *Jurnal Islam Futura*, Vol. XIII, No. II, (T.K: T.P, 2014), 185.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122
- Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 12-22.
- Harry C. Boyte, *The Citizen Solution: How You Can Make a Difference*, St. Paul: Minnesota Historical Society, (2008), hlm. 15. Harvard University Press, 1958), 116.
- Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), 22. legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2017), 105.
- Lihat Aristoteles, *Politik*, Yogyakarta: Bentang Budaya, (2004), hlm, 161. Diterjemahkan dari buku *Polities*, New York: Oxford University Press, (1995).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm. 42-44.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153. Pelajar.hlm. 20-21
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93-105.
- Plato, *The Laws of Plato*, Manchester: University of Manchester Press, (1921), hlm. 49.
- Roger, S. (2010). *Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009*. salatiga: Pustaka
- Sahroni, A., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., & Afriani, A. L. (2020). "POLITIK TANPA MAHAR": SEMIOTIKA JARGON KOMUNIKASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI ERA DEMOKRASI BIAYA TINGGI. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 13(2).

- Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.
- Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Cet. III, 2012), 22.
- Toive Aartolahti, dkk, Grolier: Encyclopedia of Knowledge, Vol. XV, (United States: Academic American Encyclopedia, 1997), 173.
- Zaprul Khan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.